

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dikatakan tidak berpengaruh karena PAD yang masi rendah yang dapat dilihat dalam 3 tahun terakhir yaitu 6,1% dari total pendapatan daerah. Itu menunjukan pendapatan yang berasal dari kekayaan daerah masi rendah dan lebih bnyak pendapatan yang di dapat dari pemerintah pusat dan pendapatan lainnya. Hal ini bisa juga disebabkan oleh faktor non keuangan.
2. Tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dikatan berpengaruh karena pemerintah daerah menggunakan DAU untuk memenuhi kebutuhan daerahnya karena keuangan daerah tidak mampu memenuhi semua kebutuhan daerah sehingga membutuhkan dana dari pemerintah pusat.
3. Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota. Dikatakan berpengaruh karena pemerintah melakukan belanja modal terhadap aset tetap atau aset lainnya yang memang dibutuhkan pemda untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat.
4. Temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota. Semakin sedikit temuan audit dilihat dari opini audit, semakin baik kinerja pemerintah daerah.

5.2. Keterbatasan

1. Pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel karakteristik pemerintah daerah yang digambarkan melalui tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal dan opini audit BPK. Variabel ini hanya menjelaskan sebagian dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel opini audit BPK. Dalam opini tersebut tidak dijelaskan secara detail seberapa besar temuan audit suatu daerah. Opini audit hanya mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan tidak memberikan pendapat.
3. Pada penelitian ini peneliti juga memiliki keterbatasan untuk mengakses data. Data yang dikeluarkan oleh kemendagri di websitenya belum yang terbaru dan juga kesusahan mendapat data dari BPK.
4. Untuk melakukan pengambilan data sebaiknya didahulukan surat surveynya karena akan menunggu lama untuk mendapatkan data dari BPK.

5.3 Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel penelitian dan bukan hanya pada faktor keuangan saja tetapi non keuangan juga bisa menjadi salah satu alternatif dan menggunakan data yang terbaru.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel yang pengukurannya lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, I., 2014, *Audit Sektor Publik, Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintah*, Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Ghozali, 2016, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi kedelapan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro-Semarang.

_____, Imam. 2016, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, Edisi Kedelapan, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan, Serta Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mustikarini dan Fitriyasi, 2012. Pengaruh Karakteristik Pemeritah Daerah dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diIndonesia Tahun Anggaran 2007. Forum: *Simposium Nasional Akuntansi 15*,<http://www.sna.akuntansi.unikal.ac.id>

Nugroho, 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Pada Periode 2009-2011), *Skripsi*, Universitas Diponegoro.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan.

Rahmanurrasjid, Amin. 2008. Akuntabilitas dan Trasparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen), *Tesis*, Universitas Diponegoro.

Seran, 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2014)

Suhardjanto, Djoko dan Yulianingtyas, Rena Rukmita. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada

Kabupaten/Kota di Indonesia), *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 8/No. 1/November 2011: 1-94

Sumarjo, 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia), *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret.

Suwardjono, 2005, *Teori Akuntansi. Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, Edisi Ketiga, BPFE-Yogyakarta.

Ulum, I. MD., 2008, *Akuntansi Sektor Publik*, Malang: UMM Press.

Undang-Undang No. 15 tahun 2004 (UU No. 15/2004) tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Zuliarti, 2012, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus, *Skripsi*, Universitas Maria Kudus.